

TINJAUAN PERBANDINGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAVID CAMERON & THERESA MAY TERKAIT BREXIT

Yola Amanda

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Riau

Email: yolasanturictk@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan Tinjauan Perbandingan Pengambilan Keputusan David Cameron & Theresa May terkait Brexit. Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa didasari oleh hasil referendum pada tanggal 24 Juni 2016 dan menghasilkan 51,9% suara yang memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Sementara itu Perdana Menteri Inggris, David Cameron masih menginginkan agar Britania Raya tetap terintegrasi dengan Uni Eropa tetapi karena keputusan voting menyetujui referendum, maka ia mengumumkan untuk mengundurkan diri dari jabatan sehingga digantikan oleh Theresa May. Tulisan ini menggunakan Teori Rational Choice terhadap perbedaan pengambilan keputusan antara kedua Perdana Menteri Inggris tersebut terkait brexit dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kepustakaan. Hasil dari Tulisan ini adalah peran Theresa May yang berfungsi sebagai penghubung bagi aspirasi warga Britania Raya yang menginginkan agar Inggris lebih independen dan memiliki kewenangan yang penuh di segala bidang atas negaranya

Kata Kunci : Brexit, Uni Eropa, Pengambilan Keputusan, Theresa May

PENDAHULUAN

Awal terbentuknya Integrasi Uni Eropa dipelopori oleh peran Amerika yang saat itu merupakan negara pemenang dalam Perang Dunia Kedua dan menjadi *Golden Stocker* sehingga dapat memulihkan perekonomian Eropa yang sangat kacau pada masa itu dimana merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian setelah masa damai pasca perang dunia kedua, menjadikan Eropa sebagai pasar untuk dimasuki oleh barang-barang Amerika dan merupakan upaya untuk mengurangi paham komunisme di wilayah tersebut dan tentunya dengan menyebarkan paham Demokrasi Amerika sendiri. Dengan cara memberikan Marshall Plan dalam pembangunan ekonomi dan dalam bidang militer dengan memperkuat

stabilitas keamanan dengan jalan damai maka di bentuklah NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) pada tahun 1949 yang juga merupakan penyeimbang Pakta Warsawa milik USSR. Dengan bantuan ekonomi yang diberikan melalui Marshall Plan menuju pemulihan ekonomi Eropa maka hal tersebut yang merupakan langkah awal terjadinya Uni Eropa karena setelahnya pada tahun 1948 dibentuk (*Organization for European Economic Cooperation*) atau Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa untuk menjalankan dan mengkoordinir bantuan Marshall Plan itu sendiri dalam rekonstruksi ekonomi Eropa pasca perang dunia kedua kemudian berkembang hingga terbentuknya *European Economic Community* yang berperan penting dalam peningkatan

perdagangan di kawasan Eropa dan mempermudah dalam penukaran mata uang.

Pada tahun 1960-an Eropa Barat sudah mulai merancang dalam mempertimbangkan kesatuan moneter melalui pembentukan *European Monetary System* (Pembentukan Sistem Moneter Eropa) lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Eropa Tunggal (*Single European Act*) pada tahun 1986 hingga menjadi rincian agar terciptanya pasar Eropa bersatu pada tahun 1992 dan berkembang menjadi percepatan penyatuan Eropa maka pada 9 Februari 1992 terbentuklah Uni Eropa dengan disepakatinya perjanjian Maastricht. Maka dengan terbentuknya Uni Eropa sehingga terciptanya *Economic Monetary Union* dengan menghubungkan mata uang nasional antara negara – negara anggota menjadi satu mata uang bagi kawasan Eropa yang disebut euro. Kemudian dibentuk lah *European Central Bank* yang bertugas untuk mengatur kebijakan moneter di wilayah Eropa secara komprehensif.

Berita mengenai keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa yang disebut dengan Brexit atau British Exit adalah rencana penarikan diri Britania keluar dari Uni Eropa sebagai hasil dari referendum Brexit yang diadakan pada 23 Juni 2016. Dimana referendum tersebut diikuti oleh 30 juta penduduk Britania Raya dan mendapatkan hasil bahwa 51,9% penduduk yang sepakat memilih untuk keluar dari Uni Eropa dan 48,1% sepakat memilih untuk tetap bergabung di Uni Eropa. Sebelumnya proses Referendum Brexit sudah pernah dilakukan pertama kali pada tahun 1975 yang menghasilkan keputusan bahwa lebih dari setengah penduduk Britania Raya yang setuju untuk tetap bergabung di Uni Eropa. Atas kemenangan penduduk yang menginginkan Brexit membuat Perdana Menteri David Cameron memilih untuk mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Perdana Menteri Theresa May yang pro

kepada Brexit dimana keputusan David Cameron untuk mundur telah sesuai dengan asas demokrasi yaitu karena sesuai dengan perolehan suara terbanyak masyarakat Inggris (Britania Raya) maka dibutuhkan pemimpin baru yang bisa menjembatani aspirasi dari masyarakat tersebut).

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Inggris memilih untuk Brexit. **Pertama**, Masyarakat Inggris beranggapan bahwa Uni Eropa telah berubah drastis, awalnya dari komunitas ekonomi Eropa yang hanya mengurus perekonomian dan pasar tunggal dengan 9 jumlah anggota hingga menjadi perserikatan besar yang beranggotakan 28 negara yang mengatur hampir seluruh kebijakan di wilayah Eropa. Lebih dari 500 juta orang populasi di Uni Eropa telah berubah menjadi serikat politik dan sangat besar pengaruhnya, bahkan melampaui kebijakan dari parlemen di negara anggota Uni Eropa itu sendiri.

Kedua, keresahan masyarakat Inggris terkait imigran Eropa. Sejak meluasnya keanggotaan Uni Eropa dengan masuknya negara-negara Eropa Timur tahun pada 2004, laju pertumbuhan imigran Eropa yang masuk ke Inggris semakin tinggi. Imigran pekerja seperti contoh para tukang ledeng dari Polandia, pekerja konstruksi, pelayan dan staf bar awalnya disambut dengan baik oleh masyarakat Inggris, tetapi sejak krisis 2008, standar kehidupan masyarakat menurun dan keresahan mulai muncul terkait imigran asing yang memasuki wilayah Inggris. *UK Independence Party* mengatakan, keanggotaan Inggris di Uni Eropa membuat Inggris dibanjiri imigran yang tidak berguna dan kurang memiliki skill dibandingkan warga lokal Inggris pada beberapa arena kerja seperti montir, pekerja di swalayan dan mini market serta berbagai restoran cepat saji yang lebih banyak diduduki oleh para imigran. Kejadian yang sama seperti presiden Amerika Serikat,

Donal Trump yang menunjukkan sikap anti imigran dikarenakan menurut pandangan beliau terlalu banyak perkerjaan di Amerika Serikat didududki oleh para imigran disbanding warga lokal Amerika Serikat sendiri, maka semboyan Donal Trump yang sangat terkenal bahkan sejak ia masih dalam proses kampanye prepilpres yaitu *American First and Make America Great Again*. Kembali ke brexit, jika keluar dari UE, UKIP mengajukan kebijakan imigran dan akan mengadopsi dari kebijakan yang diterapkan di Australia, yaitu Inggris hanya menerima orang-orang asing berkemampuan khusus yang memang dibutuhkan oleh negara Inggris. Contohnya: Australia menerima chef, montir, arsitek, dan tenaga medis seperti perawat, karena memang negara kekurangan tenaga kerja yang terampil di bidang tersebut.

Berdasarkan hasil voting referendum masyarakat Inggris (Britania Raya) yang memilih brexit maka akan terkordinasi bagi Aktor pengambil Kebijakan yang berasal dari rational choice Perdana Menteri Inggris demi mencapai kepentingan nasional yang bisa kita lihat dari pemaparan diatas bahwa Theresa May adalah sosok yang menyetujui Brexit yang menyebabkan dia naik menjadi perdana Menteri dengan Proses aklamasi dari partai konservatif dengan cara aklamasi karena David Cameron, Perdana Menteri sebelumnya adalah orang yang masih ingin agar Britania Raya tetap bertahan di Uni Eropa dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Maka disini, Theresa May adalah aktor yang berperan sebagai penyambung aspirasi dari warga Britania Raya.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Proses Analisis data dilakukan melalui literatur jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah dan buku-buku

mengenai Brexit, Uni Eropa dan berbagai topik yang berkaitan dengan hal yang akan dibahas di dalam tulisan ini dengan melakukan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Perbedaan Pengambilan keputusan yang diambil oleh David Cameron dan Theresa May terkait British Exit juga memiliki dampak yang berlawanan arah bagi kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Britania Raya. Jadi unit analisis di sini adalah *Rational Choice* yang diambil oleh pemerintah berdasarkan porsi untung dan rugi yang telah dipertimbangkan oleh aktor yang akan menjadi *decision maker* nantinya. Teori *Rational Choice* mengatakan bahwa: *“It proceeds from assumption, or axioms, about human motives and behavior, and draws the logical institution and policy implication from those axioms. One aspects of this “methodological individualism”, which argues that all social phenomena are derivable from, or can be factored into, the properties and behaviors of individuals. A second aspect is that political actors-voters, politicians, bureaucrats-are assumed to be material interest maximizers, seeking benefits in the form of votes, offices, power and so on, at least cost.”* (Gabriel A. Almond, 1990, hal 123). Teori pilihan rasional disini, memfokuskan pada sifat dan tingkah laku individu dalam lingkungan internasional, teori ini juga menjelaskan bahwa setiap negara apabila melakukan kerja sama akan didasarkan pada pilihan rasional, maksudnya setiap negara akan melihat seberapa besar keuntungan yang akan didapat dan berusaha untuk menghindari atau memperkecil kerugian yang mungkin diperoleh. (Mohtar Mas’oed, 1998).

Setelah David Cameron mengundurkan diri pada 2016 maka Theresa May lah yang maju menjadi Perdana Menteri dengan proses aklamasi dan juga terpilih sebagai pemimpin partai konservatif. Tokoh utama yang

mendukung kubu brexit selain Theresa May yaitu Michael Gove, Menteri Kehakiman Inggris, Boris Johnson, mantan walikota London dan juga hampir setengah dari anggota dewan partai konservatif. Juga Partai Sayap kanan anti imigran seperti *Britain First* dan *UK Independence Party* yang dipimpin oleh Nigel Farage merupakan pendukung ekstrem keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.

Tabel 1. Perbandingan Pengambilan Keputusan oleh Kedua Perdana Menteri Inggris Berdasarkan Teori *Rational Choice*

No	David Cameron	Theresa May
1	Mengundurkan diri karena menghargai hasil suara masyarakat Britania Raya (Inggris) sebanyak 51, 9 % yang menginginkan referendum Brexit.	David Cameron mengundurkan diri, Theresa May naik menjadi Perdana Menteri dengan proses aklamasi.
2	Pengunduran diri tersebut karena menghargai pilihan mayoritas masyarakat Inggris, yang dalam artian menjunjung tinggi nilai demokrasi.	Theresa May merupakan tokoh pro Brexit
3	Maka dari itu David Cameron menginginkan pemimpin yang penggantinya yang dapat menjadi penyambung aspirasi rakyat Britania Raya terkait Brexit.	Proses dimulainya Brexit dari Uni Eropa memunculkan berlakunya pasal 50 pada Maret 2017.

Pasal 50 di sini adalah Pasal 50 Perjanjian Lisbon yang disahkan di mana digunakan jika negara anggota Uni Eropa berniat untuk keluar dari perserikatan regional

kawasan tersebut. Yang tepatnya pasal 50 tersebut merupakan legalisasi atas pencabutan diri dari keanggotaan Uni Eropa. Pasal 50 Perjanjian Lisbon tersebut adalah:

- 1) Anggota Uni Eropa yang memilih untuk keluar harus mengikuti konstitusi atauran hukum yang berlaku dan yang telah disepakati sejak awal.
- 2) Negara anggota yang telah memutuskan untuk menarik diri harus memberitahu kepada Dewan Eropa lalu dilaksanakan perundingan oleh negara anggota yang lain termasuk pengaturan kerangka hubungan dimasa depan antara negara yang telah memutuskan untuk menarik diri dengan Negara yang masih menjadi anggota Uni Eropa dimana diatur dalam pasal 128 ayat 3 tentang fungsi Uni Eropa yang selanjutnya akan dibahas di Parlemen Eropa.
- 3) Perjanjian tersebut akan terhitung berlaku sejak suatu Negara mengajukan niat pengunduran dirinya dari Uni Eropa. Pengunduran diri akan dinyatakan gagal jika proses perundingan melebihi waktu dua tahun kecuali jika terdapat perjanjian khusus dengan Dewan Eropa untuk perpanjangan periode perundingan.
- 4) Anggota Dewan Eropa yang menjadi perwakilan negara yang menarik diri tidak akan berpartisipasi dalam Diskusi Dewan Eropa terkait pengambilan keputusan akhir. Persetujuanyang diperoleh dari mayoritas merupakan faktor utama sebagai syarat terpenuhinya keputusan.
- 5) Jika suatu Negara telah menarik diri dari Uni Eropa dan ingin bergabung kembali, maka Negara tersebut harus tuduk pada prosedur pada pasal 49 dari Perjanjian tentang fungsi Eropa.

Sejauh ini dampak Referendum Brexit dari Uni Eropa dari 2 aspek:

- 1) Terkait kependudukan warganya akan kehilangan status sebagai warga Uni Eropa yang akan berdampak pada kesulitan untuk

akses atau bepergian ke wilayah anggota Uni Eropa dan warga yang masih menjadi anggota Uni Eropa akan kehilangan hak yang sama untuk mengakses Britania Raya.

- 2) Terkait masalah Perekonomian diperkirakan akan mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Britania Raya (Inggris) kearah yang lebih buruk disebabkan oleh sebagian besar Negara yang memiliki kepentingan Industri yang mendukung Inggris untuk tetap bertahan di Uni Eropa dan melanjutkan keanggotaannya. Dikarenakan oleh Otoritas Keamanan Makanan Eropa (EFSA) yang akan mengatur ekonomi setelah Brexit. Industri makanan dan minuman yang bernilai £ 28,8 miliar bagi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Inggris, dengan mempekerjakan ratusan ribu orang di seluruh negeri. Sementara itu, 24% dari tenaga kerja yang menggantungkan pekerjaan dibidang makanan dan minuman di Britania Raya (Inggris) terdiri dari para migran. Sementara Area Ekonomi Eropa (EEA) pada tahun 2016 yang dimana menurut Komite Penasihat Migrasi Inggris bahwa sebagian besar industri makanan dan minuman Inggris ingin untuk tetap berada pada peraturan Uni Eropa, dikarenakan oleh neraca perekonomian harus tetap diselaraskan dengan Uni Eropa meskipun nanti setelah keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.

SIMPULAN

Sejauh ini keputusan mengenai Brexit masih menjadi polemik, disatu sisi penolakan yang dilakukan oleh warga Inggris yang tidak setuju Untuk keterintegrasian Britania Raya dalam Uni Eropa adalah agar Britania Raya memiliki kendali penuh dalam menjalankan kebijakan dan roda pemerintahan Negara dalam segala aspek tanpa harus terikat perundang-undangan yang diatur di dalam Uni

Eropa dan karena ketidaksetujuan mereka terhadap ledakan Imigran yang masuk ke wilayah Britania Raya atau yang disebut dengan istilah *Xenophobia* yaitu perasaan benci terhadap orang asing. Dengan alasan bahwa imigran dapat mengancam warga local dalam hal pekerjaan di Negara mereka sendiri. Padahal disisi lain Imigran juga dibutuhkan di Uni Eropa dikarenakan oleh rendahnya tingkat kelahiran di wilayah tersebut yang mana terkait masalah rendahnya tingkat kelahiran, maka efek jangka panjangnya bukan tidak mungkin jika Inggris mengalami *aging population* seperti yang terjadi hingga kini di Jepang dikarenakan piramida tingkat kelahiran yang mengerucut dimana generasi tua adalah mayoritas penduduk yang kini tinggal di Jepang. Hingga kini keputusan Brexit masih dalam proses peninjauan kembali tetapi usaha Perdana menteri Inggris, Theresa May dalam memperjuangkan Brexit masih dalam tahapan dan juga mengalami proses sangat panjang, dengan tetap mengupayakan berbagai agregasi kepentingan dari mayoritas masyarakat Inggris yang memilih untuk Brexit yang dimana masih akan dilanjutkan oleh Perdana Menteri baru Inggris yaitu Boris Johnson yang merupakan mantan menteri Luar Negeri Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia, Apa yang Perlu Diketahui Soal Brexit? 22 Juni 2016 yang dapat diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160621133252-134-139780/apa-yang-perlu-diketahui-soal-brexit>.

Dewi Tidore, M. A. S. H. I. T. A. (2017). *Dinamika Referendum Inggris di Uni Eropa Studi Kasus: Referendum Brexit* (Doctoral Dissertation).

Harirah, J. S. (2019). *Pengaruh Brexit terhadap Hak Tinggal Imigran Uni*

Eropa di Inggris (Doctoral Dissertation).

- Hartanto, H. (2018). Referendum Brexit dan Kembali Mengemukanya Kedaulatan Negara serta Dampaknya Bagi Dunia dan Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(1).
- Kultsum, F. F., & Wiyanarti, E. Dinamika Inggris dan Uni Eropa: Integrasi Hingga Brexit. *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 163-174.
- Malay, F. R. (2018). Politik Pembangunan Inggris di Masa Pemerintahan Theresa May Pasca Brexit.
- Rezkyniine, M. S., Tulung, T., & Sampe, S. (2018). Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Tentang Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa pada Tahun 2016. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).